

# ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## ABSTRAK

Perceraian yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan dampak emosional dan sosial, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi pihak yang dirugikan, khususnya dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pembagian harta bersama dalam perceraian yang mengandung unsur KDRT pada lingkungan Peradilan Agama, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan bahwa hukum perkawinan nasional maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara eksplisit mengenai KDRT sebagai variabel determinan dalam pembagian harta bersama; keduanya masih berpijak pada asas keadilan formal yang bersifat umum. Dalam putusan yang dikaji, fakta KDRT telah digunakan hakim sebagai dasar perceraian dan pemenuhan hak normatif istri, namun belum diintegrasikan ke dalam pertimbangan perkara harta bersama. Berdasarkan analisis melalui Teori Kepastian Hukum, esensi kepastian tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal semata, melainkan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa KDRT sepatutnya dipertimbangkan sebagai faktor relevan dalam pembagian harta bersama demi mewujudkan keadilan yang berkepastian hukum bagi korban.

**Kata kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Harta Bersama, Perceraian, Peradilan Agama.

# LEGAL ANALYSIS OF THE DIVISION OF MARITAL PROPERTY FOLLOWING A DIVORCE CAUSED BY DOMESTIC VIOLENCE

## ABSTRACT

*Divorce involving domestic violence not only causes emotional and social harm but also affects the fulfillment of economic rights, particularly in the division of marital property. This study aims to analyze the regulation and application of marital property distribution in divorce cases involving domestic violence within the Indonesian Religious Courts, focusing on Decision of the Bandung Religious High Court Number 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings the study reveals that neither the Indonesian Marriage Law nor the Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly recognizes domestic violence as a determining factor in marital property division; both frameworks remain grounded in generalized formal justice. In the analyzed ruling, while domestic violence served as the legal ground for divorce and the granting of the wife's normative rights, it was not directly integrated into the marital property adjudication. Based on the Theory of Legal Certainty, the essence of certainty should not be interpreted merely as strict adherence to formal procedures but must also provide tangible legal protection for the parties involved. Consequently, this research concludes that domestic violence should be acknowledged as a relevant factor in the division of marital assets to achieve legal certainty that is equitable for the victim.*

**Keywords:** *domestic violence, marital property, divorce, religious courts.*